

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan BPR.

Fungsi BPR tidak hanya menyalurkan kredit kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran. Karena proses kreditnya yang relative cepat, persyaratan lebih sederhana dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabah.

Jenis layanan yang diberikan BPR yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, maupun Kredit Konsumsi. Ada juga jenis layanan yang tidak diperbolehkan di BPR antara lain menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan dalam valuta asing, dan melakukan usaha perasuransian.

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah BPR Konvensional

Tahun	Jumlah BPR Konvensional
2009	1.733
2010	1.706
2011	1.669
2012	1.653
2013	1.653

(sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2013, diolah kembali)

Pada dasarnya tujuan utama yang ingin dicapai oleh semua perusahaan adalah bagaimana perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas atau tindakan ekonomi perusahaan. Kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, misalnya penggundulan hutan, polusi udara dan air, dan perubahan iklim. Begitu pula yang terjadi di Indonesia, banyak perusahaan yang hanya berorientasi pada maksimalisasi laba untuk menunjukkan kinerjanya dan mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul oleh perusahaan, hal tersebut kemudian merugikan masyarakat.

Pada era ini, tanggung jawab sosial semakin mendapatkan perhatian oleh kalangan dunia usaha. Sejak era reformasi bergulir, masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat tersebut memunculkan kesadaran baru terhadap perusahaan

tentang pentingnya melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Daniri, 2008). Selain itu, dorongan perusahaan untuk melaksanakan CSR adalah karena adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

suatu entitas bisnis tentu saja tidak lepas dari tujuan utamanya yaitu memperoleh keuntungan, namun bagaimana cara memperoleh keuntungan tersebut, disinilah CSR berperan. Pembangunan perusahaan yang berkelanjutan harus dibangun atas dasar kerangka bahwa bisnis akan dapat tumbuh subur di atas masyarakat yang sejahtera dan kondisi lingkungan yang baik. Perusahaan tidak bisa menjual produk atau jasa bila daya beli masyarakat rendah dan juga tidak bisa melanjutkan produksinya jika dampak usahanya merugikan masyarakat dan lingkungan (terutama untuk perusahaan yang input utamanya berasal dari alam). Korten (2001) menuliskan bahwa dunia bisnis selama setengah abad terakhir telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa di planet ini, dan sebagai institusi yang dominan maka dunia bisnis harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama. Setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam bisnis harus dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut. Bila sebuah perusahaan ingin meningkatkan profit dan menjaga agar dapat berlangsung secara terus menerus (*sustainable*), sudah seharusnya pula ia meningkatkan kepedulian dan tanggung jawabnya pada bidang sosial dan lingkungan. Bahkan bagi perusahaan yang sudah menyadari pentingnya CSR akan dapat melihat CSR bukan lagi

sebagai pusat biaya (*cost center*) melainkan sebagai pusat laba (*profit center*) di masa mendatang.

Ada beberapa fenomena CSR baik ditingkat global maupun di Indonesia juga dipicu oleh banyak kasus yang terjadi di dalam komunitas bisnis. Sebagai contoh kasus Nike, perusahaan produsen perlengkapan dan alat-alat olahraga (berpusat di Amerika) yang tersandung masalah CSR di tahun 1996. Perusahaan tersebut dituduh telah mengabaikan etika bisnis korporasi di antaranya dengan memeras buruh di negara-negara berkembang (Hasibuan dan Sedyono, 2006).

Peristiwa yang terjadi belakang ini juga ikut menyadarkan akan arti pentingnya penerapan CSR. Sebagai contoh yang masih sangat segar adalah kasus lumpur panas di ladang migas PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo. Pada kasus tersebut mengakibatkan perusahaan mengeluarkan anggaran yang tidak kecil bahkan terhenti operasinya akibat adanya komplain masyarakat (www.sinarharapan.co.id).

Masalah isu pencemaran lingkungan yang lain adalah pencemaran yang dilakukan perusahaan tambang PT. Newmont Minahasa Raya yang beroperasi di wilayah Teluk Buyut, Kabupaten Bolang Mongondou Sulawesi Utara tahun 2004. Limbah tailing (sisa buangan tambang) yang dihasilkan perusahaan tambang emas itu disebut-sebut mengakibatkan lebih dari 100 warga di Teluk Buyut terkena penyakit Minamata. Penyakit Minamata yang selama ini menyerang syaraf dikenal sebagai penyakit yang muncul akibat terkontaminasi logam berat seperti arsenik dan merkuri. Sejumlah LSM seperti Walhi dan Jatam menyampaikan bahwa penyakit yang diderita masyarakat di sekitar Teluk Buyut karena

bertambah kadar arsen dan merkuri di laut di tempat PT. Newmont membuang limbahnya. (www.bisnis.com)

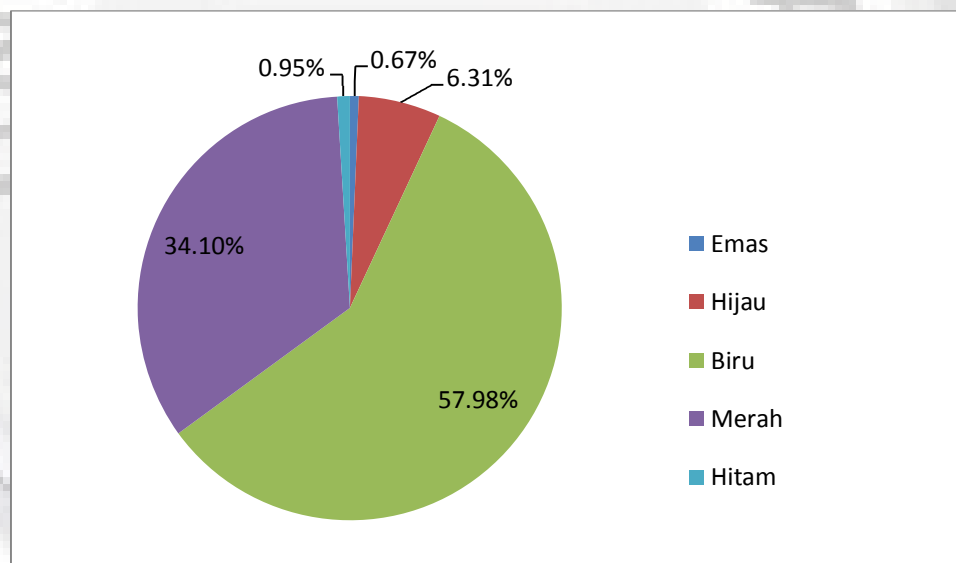
Terdapat fenomena lain di tahun 2009 yang menggambarkan bahwa perusahaan tambang merupakan perusahaan yang sangat sensitif pada dampak pencemaran lingkungan. Fenomena lain itu adalah gencarnya isu dari LSM lingkungan yang kerap mengidentikkan pertambangan dengan kehancuran lingkungan dinilai tidak tepat. Walaupun isu itu gencar terjadi di Indonesia, karena tidak adanya rencana reklamasi dari perusahaan pertambangan. Kebanyakan perusahaan pertambangan di Indonesia hanya melakukan replantasi namun juga melakukan reklamasi. Kedua hal itu adalah hal yang berbeda, reklamasi adalah pencemaran peruntukan daerah pertambangan setelah dieksploitasi, sedangkan replantasi adalah penanaman kembali daerah tambang pasca dieksploitasi. Reklamasi itu sendiri juga merupakan salah satu kegiatan CSR (www.detikbandung.com).

Selain fenomena di atas yang membuat tertarik untuk meneliti CSR adalah, karena perusahaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak ada satupun yang masuk kedalam kategori perusahaan memperoleh “medali emas” untuk periode 2012-2013. Penilaian yang masuk dalam program “Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan” (PROPER) itu merupakan salah satu program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berupa kegiatan pengawasan dan pemberian insentif dan atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan. Penghargaan PROPER itu bertujuan mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan

mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*). Kriteria penilaian PROPER tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan aspek ketaatan dinilai dari pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), upaya pengadiln pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3), dan penanggulangan kerusakan lingkungan khusus bagi kegiatan pertambangan (MRS/KLH)

Gambar 1.1

PROPER Periode 2012-2013



Pada periode 2012-2013 ini, hasil penilaiannya adalah :

1. Peringkat emas berjumlah 12 perusahaan (0,67%)
2. Peringkat hijau berjumlah 113 perusahaan (6,31%)
3. Peringkat biru berjumlah 1039 perusahaan (57,98%)

4. Peringkat merah berjumlah 611 perusahaan (34,1%)
5. Peringkat hitam berjumlah 17 perusahaan (0,95%)

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting* (SR), SR adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (ACCA, 2004). SR harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang, sedangkan *Sustainable Development* yang membawanya menuju kepada *core business* dan sektor industrinya. SR sangat diperlukan agar *stakeholders* termasuk masyarakat, mengetahui segala bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan.

Awal munculnya konsep pembangunan keberlanjutan adalah karena perhatian kepada lingkungan. Terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui sedang eksploitasi terhadapnya dilakukan terus menerus. Pengertian dari tidak mengurangi dan mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang adalah pembangunan yang dilakukan dimasa sekarang itu jangan sampai merusak lingkungan, boros terhadap sumber daya alam dan juga memperhatikan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim,1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.

Kesadaran yang mengacu pada perbaikan dan pengelolaan lingkungan hidup tampaknya mulai menjadi kesadaran bersama. Berbagai krisis lingkungan seperti perubahan iklim maupun pemanasan global mendesak orang untuk kembali berkawan dengan alam. Kalau perubahan iklim timbul dari hubungan sebab akibat antara efek rumah kaca dan pemanasan global maka keberlanjutan bisnis perbankan juga merupakan hubungan sebab akibat antara pelaku bisnis dan lingkungan. Perbankan perlu beradaptasi secara interdependensial dengan lingkungan sekaligus turut melestarikan lingkungan. Mengapa demikian ? karena perbankan tidak bisa hidup tanpa lingkungan yang memadai. Ini tercermin dari aspek iklim usaha yang baik maupun lingkungan hidup yang lestari. Bank yang memiliki *value*, paripurna dan berpahala adalah bank yang benar-benar peduli pada lingkungan dan masyarakat.

Bank Indonesia harus tetap mewaspadaai timbulnya beberapa resiko kestabilan makro ekonomi. Untuk itu Bank Indonesia juga mesti melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam mencermati perkembangan dan prospek perekonomian global, regional domestik untuk mengamankan stabilitas ekonomi jangka menengah (Ulfa, 2010).

Bank Indonesia mengisyaratkan perbankan akan memiliki indikator-indikator “hijau” yang lebih jelas dalam menilai korporasi yang mengajukan kredit. Jika dilihat hierarkisnya, korporasi pelaku pencemaran lingkungan dimulai dari pemberi dana. Dalam hal ini, bank dan para investor adalah pihak yang membiayai jalannya perusahaan. Itu sebabnya, perbankan mestinya juga menjadi institusi green hingga ketahap produk yang dikeluarkannya. Bank Indonesia (BI)

menyadari posisi ini dan kedepannya perbankan akan diminta menjalankan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan lebih baik. Peraturan itu telah menyebutkan perbankan mestinya memperhatikan hasil AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bagi perusahaan berskala besar dan resiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan (www.wartaekonomi.com).

BI mengaku memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnis perbankan yang ramah lingkungan di Indonesia. Untuk itu, BI akan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) *Green Banking* yang ditargetkan keluar tahun ini. Dalam aturan itu, BI akan mewajibkan perbankan memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dalam mengembangkan bisnisnya. Pedoman BI untuk menerbitkan kebijakan pro lingkungan itu, akan merujuk pada Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (www.TRIBUNnews.com).

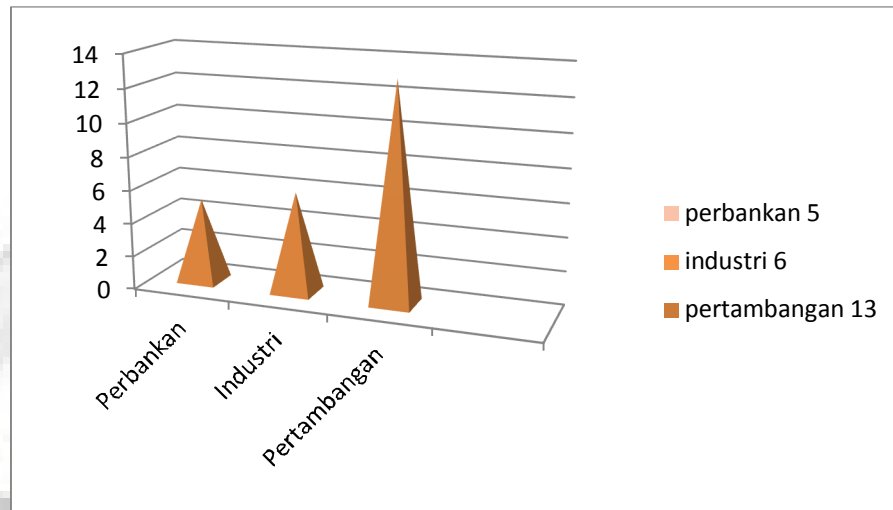
Akibat ilegal logging, deforestasi, serta kesemrawutan lanskap kota membuat perubahan iklim begitu fenomenal. Fenomena ini seharusnya tidak membuat perbankan tinggal diam. Menjadi *green bank* bukan sekedar menjalankan aktivitas *go green*, tetapi juga harus melakukan pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan sosial yang lebih baik lagi. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang timbul dari operasional bank. Bagi perusahaan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang (Budisantoso, 2011).

Perbankan masa depan adalah perbankan yang terintegrasi dengan pemeliharaan lingkungan hidup.

Fenomena lain yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu adanya 5 perbankan yang masuk SRI KEHATI dan diantara 5 perbankan tersebut tidak ada Bank Perkreditan Rakyat, yayasan KEHATI bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan indeks SRI KEHATI yang mengacu pada tata cara *Sustainable and Responsible Investment* (SRI) dengan nama indeks SRI KEHATI. Diharapkan dengan peluncuran indeks SRI KEHATI ini masyarakat mengenal adanya indeks yang menggambarkan perusahaan-perusahaan yang menguntungkan secara ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Tujuan dibentuknya indeks ini adalah untuk memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat luas mengenai ciri dari perusahaan terpilih pada indeks SRI KEHATI yang dianggap memiliki bermacam bentuk pertimbangan dalam usahanya berkaitan dengan kepedulian pada lingkungan, tata kelola perusahaan, keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, hak asasi manusia, dan perilaku bisnis dengan etika bisnis yang diterima di tingkat internasional. Yayasan SRI KEHATI menetapkan 25 perusahaan dan 5 diantaranya itu Perbankan.

Gambar 1.2

Perusahaan yang termasuk SRI KEHATI



Seiring dengan perubahan ekonomi yang berkarakteristik ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dengan penerapan manajemen pengetahuan (*knowledge management*), kemakmuran suatu perusahaan akan bergantung pada suatu penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan itu sendiri (Sawarjuwono, 2003).

Sejak tahun 1990-an, perhatian terhadap praktik pengelolaan aset tidak berwujud (*intangible assest*) telah meningkat secara dramatis (Horrison dan Sullivan, 2000). Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran intangible assest tersebut adalah *intellectual capital* (IC) yang telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai bidang, baik manajemen, teknologi, informasi, sosiologi, maupun akuntansi (Petty dan Guthrie, 2000; Sullivan dan Sullivan, 2000).

Pentingnya informasi IC merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan oleh investor. Hal ini disebabkan informasi IC dapat membantu investor untuk menilai kapabilitas perusahaan dalam menciptakan kekayaan di masa datang dengan lebih baik. Secara global, terdapat peningkatan permintaan pasar atas adanya transparansi (Brennan, 2001).

Penyajian sumber daya dalam neraca perusahaan sebagian besar dalam aset fisik atau finansial. Meskipun demikian, banyak perusahaan yang beroperasi dalam bidang industri yang berbasis pengetahuan, memperlakukan aset terpenting yang mereka miliki yang tidak pernah disajikan dalam neraca sebagai IC. Aset tak berwujud ini yang meliputi proses organisasi, *know-how* karyawan, dan hubungan yang mendukung atau menciptakan kekayaan (keuntungan) bagi perusahaan (Herremans dan Isaac, 2004).

Munculnya “new economy” yang secara prinsip didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan, juga telah memicu tumbuhnya minat dan IC (Petty dan Guthrie, 2000; Bontis, 2001). Salah satu area yang menarik perhatian baik akademis maupun praktisi adalah yang terkait dengan kegunaan IC sebagai salah satu *instrument* untuk menentukan nilai perusahaan (Edvinsson dan Malone, 1997; Sveiby, 2001). Hal ini telah menjadi isu yang berkepanjangan, dimana beberapa penulis menyatakan bahwa manajemen dan sistem pelaporan yang telah mapan selama ini secara berkelanjutan kehilangan relevansinya karena tidak mampu menyajikan informasi yang esensial bagi eksekutif untuk mengelola proses yang berbasis pengetahuan

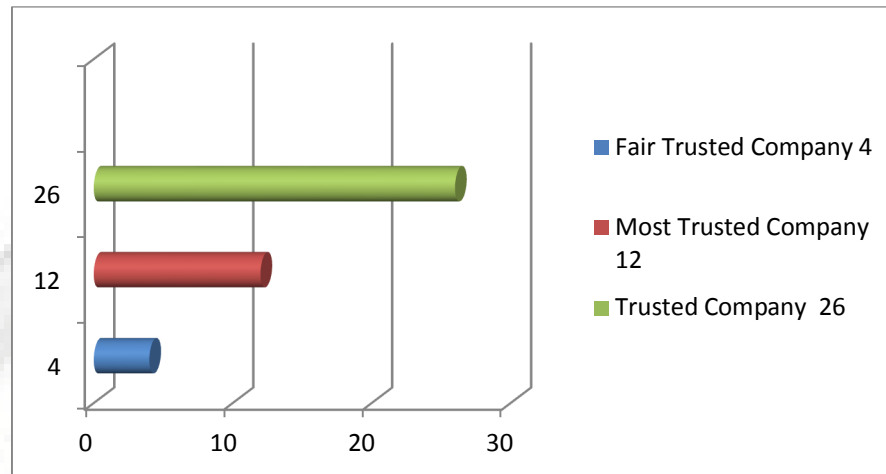
(*knowledge-based processes*) dan *intangible resources* (Bornemann dan Leitner, 2002).

IC dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan sebagai *disclosure* atas laporan keuangan (Goh dan Lim, 2004; Boekestein, 2006; Cordazzo, 2005). Kecilnya pelaporan IC yang tidak disajikan secara eksternal akan berdampak kurangnya informasi bagi investor tentang pengembangan sumber daya tak berwujud perusahaan sehingga akan menyebabkan persepsi investor akan resiko menjadi lebih tinggi. Perusahaan dengan sumber daya IC yang banyak dapat mempunyai masalah untuk mendapatkan dana pada kondisi semacam ini, seperti kurangnya informasi mengenai investasi pada IC dapat menyebabkan under estimasi laba di masa yang akan datang (Roslender dan Fincham, 2004).

Modal intelektual di Indonesia masih rendah, dan ini akan berakibat pada terancamnya daya saing Indonesia terhadap negara-negara lain, “kata Staf Deputi Gubernur Bank Indonesia Tarmidan Sitorus ketika membuka konferensi internasional tentang modal intelektual di Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari survei indeks sumber daya manusia yang merupakan komponen utama dari modal intelektual oleh berbagai lembaga. Contoh survei indeks sumber daya manusia dari Bank Dunia yang masih berada di nomor urut sembilan puluh, jauh dibawah Malaysia yang menduduki peringkat ke 40-an. Malaysia memiliki modal intelektual yang baik dan terarah hal ini tampak dengan adanya visi ekonomi berbasis pengetahuan tahun 2020 di Malaysia, sedangkan Indonesia sama sekali tidak tersentuh (www.beritasore.com)

Terdapat fenomena lain yaitu tentang penghargaan *Fair Trusted Company* (Perusahaan Cukup Terpercaya), *Trusted Company* (Perusahaan Terpercaya) dan *Most Trusted Company* (Perusahaan Sangat Terpercaya). dimana tidak ada satupun BPR yang masuk kedalam kategori *Most Trusted Company* sebagai perusahaan sangat terpercaya, karena perusahaan sangat terpercaya senantiasa berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dalam usahanya selaras dengan komitmen jangka panjangnya dalam memelihara lingkungan, hubungan yang baik dengan masyarakat, konsumen, rekan usaha, pemegang saham, pemerintah serta keberlanjutan aktivitas usaha. Yang termasuk kedalam kategori perusahaan sangat terpercaya dinilai sebagai perusahaan yang mampu menunjukkan prasarana dan sistem tata kelola perusahaan yang baik dan adanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairnes. Hal ini didukung pula oleh faktor lain seperti komitmen, kerja sama, kepemimpinan, kompetensi, nilai moral, etika serta visi dan misi perusahaan. Bekerja untuk menciptakan nilai dan menjalani bisnis secara harmonis untuk memberikan kontribusi yang optimal dengan tujuan terciptanya kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Sebanyak 42 perusahaan mengikuti ajang pemeringkatan ini, dan hasilnya 12 perusahaan meraih predikat *Most Trusted Company*, 26 perusahaan meraih predikat *Trusted Company* dan 4 perusahaan meraih predikat *Fair Trusted Company*.

Gambar 1.3

(CGPI) *Corporate Governance Perception Index*

Fenomena Perbankan di Indonesia dalam melakukan aktivitas bisnisnya, yaitu dalam memenuhi fungsi dasarnya masih mengalami berbagai permasalahan yang mendasar yang hingga saat ini. Banyak bank-bank yang belum mampu secara maksimal di dalam mengelola sumber daya mereka, sebagai contoh di satu sisi bank-bank yang mengalami *under-liquid* akan kesulitan di dalam melakukan aktivitas bisnisnya secara maksimal dikarenakan kekurangan modal sebagai dasar beraktivitas. Di sisi lain, bank-bank yang mengalami *over-liquid* juga akan mengalami permasalahan, mereka akan kesulitan di dalam menyalurkan dana-dana tersebut dan berisiko terjadinya kredit tidak tertagih.

Banyaknya permasalahan perbankan seperti yang diterangkan tersebut diatas, mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat selaku sumber dan tujuan atas aliran dana yang dihimpun oleh bank mengalami proses yang tidak stabil dan berubah-ubah. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh kinerja yang dicapai oleh dunia perbankan

itu sendiri, dan bagaimana upaya manajemen perbankan mengantisipasi setiap yang terjadi pada lingkungannya baik nasional maupun global. Perubahan-perubahan dimaksud menyangkut masalah teknologi informasi, kebijakan atau regulasi pemerintah dan otoritas moneter, serta tuntutan konsumen yang semakin variatif.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank adalah dengan analisis profitabilitas. Kinerja suatu perusahaan sering diukur dengan bagaimana kemampuan suatu perusahaan itu menghasilkan laba. Dari sudut manajemen, rasio *Return On Asset* (ROA) dipandang sebagai alat ukur yang berguna karena mengindikasikan seberapa baik pihak manajemen memanfaatkan sumber daya total yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan profit. Menurut Malayu Hasibuan (2002:100) Profitabilitas bank adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam presentase. Profitabilitas pada dasarnya adalah laba (rupiah) yang dinyatakan dalam presentase profit. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyelidiki secara empiris hubungan antara efisiensi penciptaan nilai dan kinerja keuangan perusahaan.

Lokasi yang di ambil dalam penelitian ini adalah Bank BPR di wilayah Karawang dan Purwakarta, alasan untuk mengambil di daerah tersebut karena lokasi mudah diakses, strategis dan mudah dijangkau sehingga memudahkan para calon konsumen untuk menjadi nasabah. Umumnya masyarakat Karawang dan Purwakarta adalah berwirausaha, sehingga membutuhkan pinjaman modal untuk usaha mereka maka peran BPR disini sangat dibutuhkan.

Tabel 1.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penelitian	Judul	Kesimpulan
Nurlela dan Islahuddin (2008)	<i>Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating</i>	penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> , prosentase kepemilikan, serta interaksi antara <i>Corporate Social Responsibility</i> dengan prosentase kepemilikan manajemen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
Dahlia dan Siregar, 2008	<i>Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2010-2011</i>	Aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan terbukti memiliki dampak produktif yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan
Moskowitz (1972), Simpson dan Kohers (2002)	<i>Social responsibility in Spain : Practices and motivation in firms</i>	<i>Most of the research has found a positive relationship. Which leads us to consider that the models based on the research for economic advantages prevail as explanatory paradigms of socially</i>

		<i>responsible corporate activities</i>
Soelistyoningrum (2011)	pengaruh pengungkapan <i>Sustainability Report</i> terhadap kinerja keuangan perusahaan	Hasil menunjukkan bahwa pengungkapan <i>sustainability report</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dengan arah positif
Firrer dan William (2003)	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2007-2009	Hasilnya menyatakan bahwa tidak ada pengaruh positif antara <i>intellectual capital</i> dengan kinerja perusahaan
Tan <i>et al</i> (2007)	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2007-2009	membuktikan bahwa <i>intellectual capital</i> berhubungan secara positif terhadap kinerja keuangan perusahaan maupun kinerja keuangan perusahaan di masa datang
Tsai dan Wang (2004)	<i>Intellectual Capital and ValueCreation – Is Innovation Capital a Missing Link</i>	<i>The result support that investment in R&D by semi conductor companies has had an impact on their competitive advantage and the higher ROA is consistent with higher investment in reseach and development</i>

Ulum (2008)	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2007-2009	membuktikan bahwa <i>intellectual capital</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan maupun kinerja keuangan perusahaan di masa datang, namun rata-rata pertumbuhan <i>intellectual capital</i> (ROGIG) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa datang
-------------	---	---

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan diatas serta hasil beberapa penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, SUSTAINABILITY, DAN INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP RETURN ON ASSET DI BANK PERKREDITAN RAKYAT KARAWANG DAN PURWAKARTA TAHUN 2013”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility, Sustainability* dan *Intellectual Capital* di BPR daerah Karawang dan Purwakarta?
2. Bagaimana tingkat perkembangan *Return On Asset* ?

3. Bagaimana pengaruh antara *Corporate Social Responsibility*, *Sustainability*, *Intellectual Capital* terhadap *Return On Asset* baik secara persial dan simultan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap hal-hal tersebut diatas, antara lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, *Sustainability* dan *Intellectual Capital* di daerah Karawang dan Purwakarta?
2. Untuk mengetahui tingkat perkembangan *Return On Asset* ?
3. Untuk mengetahui pengaruh antara *Corporate Social Responsibility*, *Sustainability*, *Intellectual Capital* terhadap *Return On Asset* baik secara persial dan simultan ?

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Universitas dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang memilih konsentrasi keuangan, dapat memperoleh tambahan pengetahuan dan referensi mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Sustainability*, dan *Intellectual Capital* terhadap *financial performance* (kinerja keuangan) khususnya *Return On Asset* (ROA).

2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru kepada investor dalam menilai kinerja perusahaan sehingga dapat dijadikan alat untuk pengambilan keputusan investasi dengan memilih saham perusahaan yang terdapat di Bank Perkreditan Rakyat.
3. Bagi perusahaan yang terdapat pada di Bank Perkreditan Rakyat diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa lebih meningkatkan kinerja perusahaan lagi, sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab sosial diluar perusahaan.
4. Sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut Johnson dan Johnson, dalam Nor Hadi. 2011:46 menyatakan bahwa : “*CSR is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact to society*“. Definisi ini pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Untuk itu perusahaan harus mampu mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menurut Darwin (2004) dalam Anggraini (2006) pertanggung jawaban sosial perusahaan atau CSR adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial kedalam

operasinya dan interkasinya dengan *stakeholder*, yang melebihi tanggung jawab organisasi dibidang hukum.

CSR akan secara proaktif menaikkan ketertarikan publik dengan mendorong pertumbuhan dan perkembangan komunitas. Pada dasarnya, CSR merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya untuk menaikkan ketertarikan public dengan memperhatikan tiga garis dasar (*triple bottom line*) :*People, Planet, Profit*. Selama ini belum ada satu teori tunggal yang diterima untuk menjelaskan akuntansi sosial dan lingkungan, sehingga masih banyak terdapat variasi dalam hal perspektif teoritis yang dapat diadopsi (Belkaoui dan Karpik, 1989 dalam Reverte, 2008).

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), CSR atau tanggung jawab sosialperusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting (SR)*. SR adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep sustainability pada mulanya tercipta dari pendekatan ilmu kehutanan. Kata *nachhaltigkeit* (bahasa Jerman untuk keberlanjutan) berarti upaya

melestarikan sumber daya alam untuk masa depan (*Agricultural Economic Research Istitut*, 2004) dalam (Khulman, 2010). Terdapat dua sudut pandang menekankan pada adaptasi dan harmoni, sedangkan di posisi yang lain melihat alam sebagai sesuatu yang harus ditaklukan (Khulman, 2010).

Makna lain dari keberlanjutan seperti yang dikemukakan oleh ekonom Solow (1991) dalam (Whitehead, 2006) mengemukakan keberlanjutan sebagai hasil masyarakat yang memungkinkan generasi mendatang setidaknya tetap memiliki kekayaan alam yang sama dengan generasi yang ada pada saat ini. Dan ide utama yang dimiliki oleh Solow adalah bentuk peningkatan usaha untuk terus berupaya meninggalkan sumber daya yang cukup bagi generasi mendatang secara berkelanjutan. Sehingga masalah utamanya yakni keputusan mengenai seberapa banyak yang akan dikonsumsi saat ini, bila dibandingkan dengan seberapa banyak yang mampu dilakukan, sebagai faktor penggerak utama bagi *sustainability* (Whitehead, 2006).

Pandangan lain mengenai *sustainability* dari Daly (dalam Nugroho, 2006) mengatakan *sustainability* merupakan suatu keadaan yang dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Dari pernyataan ini diusulkan tiga kaidah operasional dalam mendefinisikan keadaan dari *sustainability*, yaitu :

1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti tanah dan air harus digunakan tidak lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan sumber daya alam tersebut diperbaharui kembali.
2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan bakar dari fosil dan mineral harus digunakan tidak lebih cepat dari

kemampuan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk menggantikannya.

3. Polusi dan sampah harus dikeluarkan tidak lebih cepat dari pada kemampuan alam untuk menyerapnya, mendaur ulangnya, atau bahkan memusnahkannya.

Haris (2000) dalam Fauzi 2004, melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, (1) keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintah dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. (2) keberlanjutan lingkungan : sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi. (3) keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas publik.

Intellectual capital (IC) atau modal intelektual memiliki peran yang sangat penting dan strategis di perusahaan. Stewart (dalam Hartono, 2001) mendefinisikan IC sebagai “*intellectual capital as the intellectual material that has been formalized, capture and leveraged to create wealth by producing a higher value assets*”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa IC

merupakan sumber daya berupa pengetahuan yang tersedia pada perusahaan yang akhirnya mendatangkan *future economic benefit* pada perusahaan tersebut. Jadi inti dari keberadaan IC adalah pengetahuan itu sendiri yang didukung proses informasi untuk menjalin hubungan dengan pihak luar.

Koistra dan Zijlstra (dalam Purnomosidhi, 2006) mendefinisikan modal intelektual sebagai material yang telah diformalkan, diperoleh, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan aset yang bernilai lebih tinggi. Stewart (dalam Purnomosidhi, 2006) menyatakan modal intelektual sebagai intellectual material, yang meliputi pengetahuan, informasi, kekayaan intelektual, dan pengalaman yang dapat digunakan secara bersama untuk menciptakan kekayaan (*wealth*). Sedangkan Williams (dalam Purnomosidhi, 2006) berpendapat bahwa modal intelektual adalah informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan untuk menciptakan nilai.

Skema modal intelektual menurut (Sveby, 1997), (Stewart, 1997), dan (Edvinson dan Sullivan, 1996) menggambarkan tiga elemen yang sama, yaitu modal intelektual yang melekat pada manusia (*human capital*), modal intelektual yang melekat pada organisasi (*structural capital*), dan modal intelektual yang melekat pada hubungan dengan pihak eksternal (*customer capital*).

Intellectual capital mewakili sumber daya yang bernilai dan kemampuan untuk bertindak yang didasarkan pada pengetahuan Nahapiet dan Goshal (dalam Sugeng, 2000). Namun demikian, Dzinkowski (dalam Saputro, 2001) berpendapat bahwa *intellectual capital* merupakan hasil akhir dari proses transformasi

pengetahuan atau pengetahuan itu sendiri yang ditransformasikan ke dalam *intellectual property* atau *intellectual assets* perusahaan.

Sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian mempunyai posisi yang strategis. Untuk mendorong terciptanya perbankan yang tangguh dan efisien, diperlukan BPR yang mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini bertujuan untuk melakukan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan berusaha, dan pemerataan pendapatan. Bank umum di Indonesia, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta, dianggap belum mampu melayani masyarakat lapisan bawah seperti halnya BPR.

Alasan dipilihnya profitabilitas (ROA) merupakan indikator penting dari laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan. Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, semakin besar ROA suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi suatu dasar pengambilan keputusan investasi, dan prediksi untuk meramalkan perubahan laba yang akan datang. Investor mengharapkan dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan akan memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi.

Profitabilitas merupakan variabel moderating dalam penelitian ini disimbolkan dengan (Y). Profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA) yang didapatkan dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur, selama periode

penelitian. ROA menunjukkan perbandingan *net income* dan *total asset* perusahaan (Husnan, 1995).

Menurut Hanafi (2007:159) ROA mengukur kemampuan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset. Rasio ini dapat diperoleh dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan

Rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (*profitable*). Tanpa adanya keuntungan (*profit*), maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

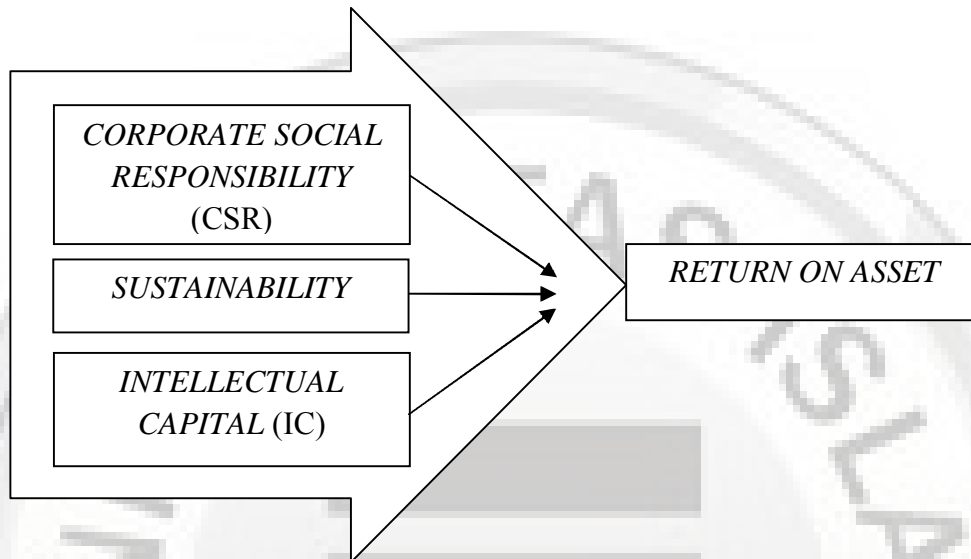
Dalam penelitian ini yang dipakai hanya yang terkait dengan investasi yaitu ROA. ROA merupakan rasio antara saldo laba bersih setelah pajak dengan

jumlah asset perusahaan secara keseluruhan. ROA merupakan salah satu rasio untuk mengukur profitabilitas perusahaan, yaitu merupakan perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata total aktiva. Dimana rata-rata total aktiva dapat diperoleh dari total aktiva awal tahun ditambah total aktiva akhir tahun dibagi dua. Menurut Syahyunan (2004:85), “*Return on Assets* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan”.





Atas dasar uraian diatas maka pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap *Financial Performance* maka dapat digambarkan dalam model paradigma seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.5



Gambar 1.5 Paradigma Penelitian

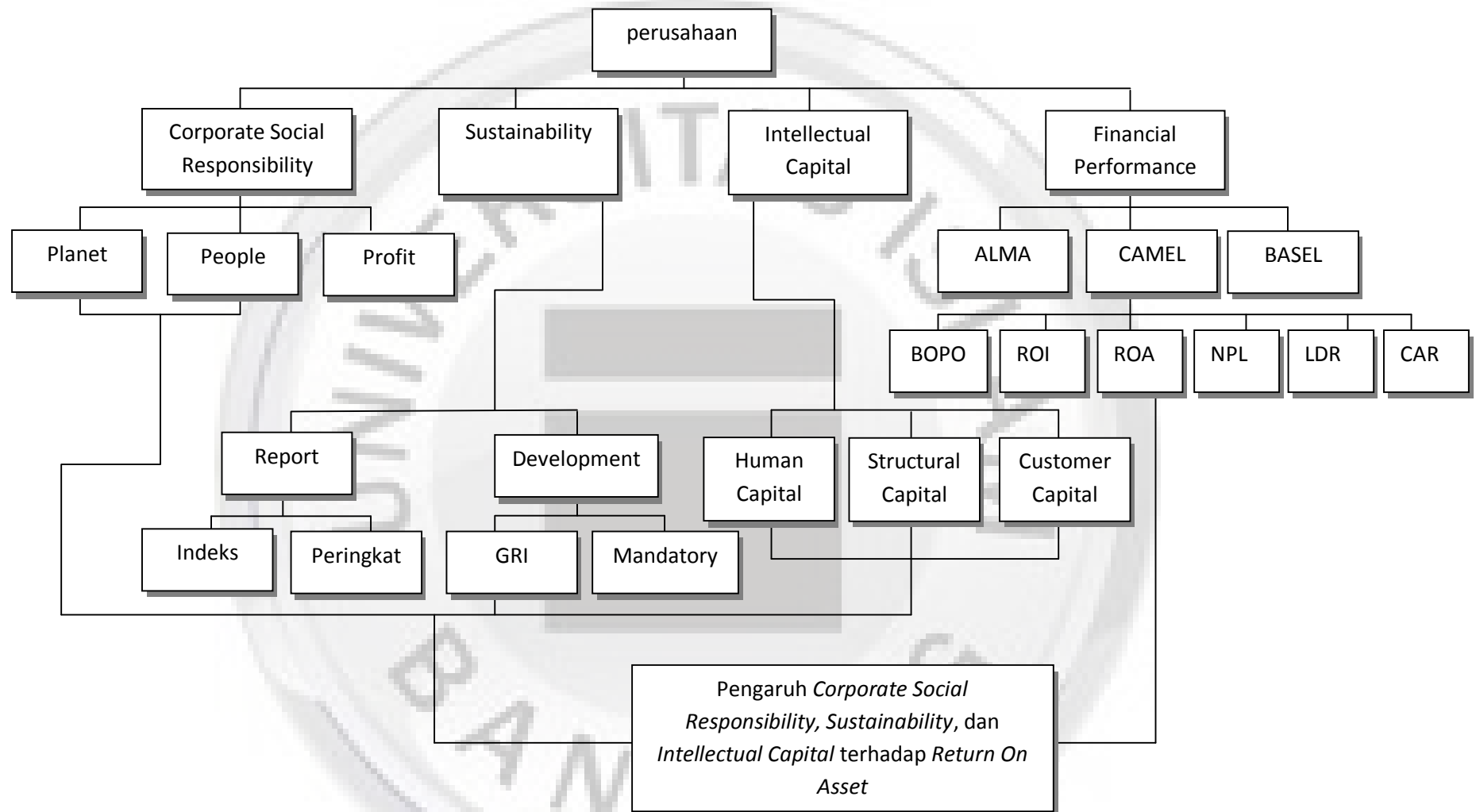
Keterangan :

Variabel independen(X) terdiri dari : *Social Responsibility* (X_1), *Sustainability* (X_2), *Intellecutal Capital* (X_3)

Variabel dependen (Y) : *Return On Asset* (ROA)

1.6 Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya (Hadi,219). Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis penelitian ini adalah **“ADANYA PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, SUSTAINABILITY, DAN INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP RETURN ON ASSET”**.



Gambar 1.4 Skema Kerangka Penelitian

